

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan

Selama melaksanakan kegiatan magang pada Dinas Pariwisata Kota Padang, penulis secara aktif mengamati dan terlibat dalam kegiatan administrasi keuangan, khususnya dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pencairan dana kegiatan. Beberapa aktivitas rutin yang dilakukan oleh pegawai, seperti bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), terlihat telah memanfaatkan sistem digital sebagai alat utama dalam menunjang kelancaran kerja.

Dalam keseharian, proses pengajuan dana dilakukan secara elektronik melalui aplikasi **SP2D Online**. Misalnya, saat kegiatan promosi pariwisata hendak dilaksanakan, bendahara akan mengajukan permintaan pencairan dana kepada BPKAD melalui aplikasi ini. Proses yang sebelumnya memerlukan pengantaran berkas fisik kini bisa dilakukan hanya dengan mengunggah dokumen elektronik dan mendapatkan notifikasi status langsung dari sistem.

Selain itu, penulis juga mengamati penggunaan **CMS Bank Nagari**. Aplikasi ini sangat membantu proses transfer keuangan ke pihak ketiga, seperti pembayaran vendor, penginapan, dan konsumsi. Bendahara tidak lagi harus datang ke bank, melainkan cukup login ke sistem dan melakukan transaksi dari ruang kerja.

Kegiatan lain yang melibatkan penulis adalah penginputan data anggaran dan realisasi ke dalam **SIPKD**, serta pembuatan laporan

pertanggungjawaban (LPJ) bulanan menggunakan **SIMDA Keuangan**. Penulis melihat bagaimana sistem ini menyajikan data secara otomatis dan terstruktur, memudahkan bendahara saat menyusun laporan ke atasan atau untuk audit.

Dari keseluruhan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa proses keuangan di Dinas Pariwisata sudah cukup terotomatisasi, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan dukungan dari pemahaman pegawai terhadap fungsi masing-masing sistem.

4.2 Analisis Penggunaan Teknologi Keuangan

Berdasarkan hasil observasi dan keterlibatan langsung selama kegiatan magang, penulis mencatat bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang telah menggunakan beberapa sistem teknologi keuangan yang mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah. Setiap sistem memiliki peran tersendiri yang saling melengkapi dan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional.

1. SP2D Online (Mempercepat Pencairan Dana)


SP2D (*Surat Perintah Pencairan Dana*) Online merupakan salah satu sistem utama yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang, termasuk Dinas Pariwisata, untuk mencairkan anggaran dari kas daerah ke rekening masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan adanya sistem ini, bendahara pengeluaran tidak lagi perlu menyerahkan dokumen fisik ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seluruh proses dilakukan sepenuhnya secara daring, mulai dari tahap pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana ke rekening operasional dinas.

Sebelum penerapan SP2D Online, proses pencairan dana dilakukan secara manual. Bendahara harus menyiapkan berkas fisik seperti RKA, SPD, SPP, dan SPM, kemudian menyerahkannya langsung ke kantor BPKAD untuk diverifikasi. Proses tersebut umumnya memakan waktu 2–3 hari kerja, tergantung antrean dan kelengkapan dokumen. Selain itu, setiap koreksi atau kekurangan dokumen mengharuskan bendahara untuk datang kembali ke kantor keuangan, sehingga menambah waktu dan biaya operasional.

Setelah penerapan SP2D Online, seluruh dokumen tersebut cukup dipindai (*scan*) dan diunggah melalui aplikasi sistem daring. Contoh nyata yang penulis amati adalah saat pencairan anggaran untuk kegiatan “*Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata*”. Pada proses ini, bendahara hanya memindai dokumen (RKA, SPD, SPP, dan SPM), mengunggahnya ke aplikasi SP2D Online, dan menunggu verifikasi dari BPKAD.

Notifikasi status pengajuan diterima langsung melalui sistem, dan dana masuk ke rekening operasional dalam waktu kurang dari satu hari kerja. Perubahan tersebut menunjukkan adanya lonjakan efisiensi waktu dan transparansi proses. Bila sebelumnya diperlukan waktu 2–3 hari kerja, kini pencairan bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Selain itu, semua tahapan terekam otomatis dalam sistem, sehingga memudahkan pelacakan status dan pengawasan.

Manfaat langsung penerapan SP2D Online di Dinas Pariwisata Kota Padang antara lain:

- 
- a. Menghemat waktu 2–3 hari kerja dibandingkan metode manual sebelumnya.
 - b. Menghindari antrean dan penyerahan berkas fisik di kantor keuangan daerah.
 - c. Meningkatkan transparansi karena seluruh tahapan pencairan terekam otomatis dan dapat dipantau oleh pejabat terkait.
 - d. Mengurangi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan administratif akibat duplikasi berkas.
 - e. Memperkuat akuntabilitas keuangan melalui pencatatan digital yang dapat diaudit dengan mudah.

Dengan adanya perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SP2D Online memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang, baik dari segi waktu pencairan, kemudahan prosedur, maupun peningkatan transparansi pengelolaan keuangan.

2. CMS Bank Nagari (Transaksi Non-Tunai Langsung dari Kantor)

Cash *Management System* (CMS) merupakan layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh Bank Nagari untuk mendukung transaksi non-tunai pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan bendahara pengeluaran melakukan transfer dana secara langsung dari kantor tanpa perlu datang ke bank, baik untuk pembayaran ke pihak ketiga seperti vendor, hotel, maupun pelaksana kegiatan dinas.

Sebelum penerapan CMS, proses pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan secara manual. Bendahara harus datang langsung ke kantor

cabang Bank Nagari untuk menyerahkan berkas fisik dan mengisi formulir transaksi. Proses ini biasanya membutuhkan waktu setidaknya satu hari kerja, bahkan bisa lebih lama jika antrean di bank ramai atau ada koreksi berkas. Selain itu, setiap transaksi harus disertai bukti tanda tangan pejabat berwenang secara manual, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian.

Setelah penerapan **CMS Bank Nagari**, seluruh proses pembayaran dapat dilakukan secara digital dari kantor Dinas Pariwisata. Setelah dana SP2D dicairkan, bendahara cukup masuk ke portal CMS menggunakan akun resmi yang dilindungi dengan autentikasi ganda (*two-factor authentication*). Melalui portal tersebut, bendahara memilih rekening sumber dan tujuan, menginput nominal, serta menambahkan deskripsi pembayaran. Proses verifikasi dan persetujuan dilakukan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pengamatan penulis selama magang, CMS Bank Nagari telah digunakan untuk berbagai kegiatan operasional, termasuk dalam kegiatan "*Promosi Wisata Kuliner Lokal*". Pada kegiatan tersebut, seluruh pembayaran kepada pihak penyedia jasa seperti katering, dokumentasi, dan media promosi dilakukan melalui CMS. Dana langsung ditransfer ke rekening penerima dalam hitungan menit setelah disetujui, tanpa perlu kunjungan ke bank.

Tabel 4. 1. Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan *Cash Managemant System* (CMS) Bank Nagari di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dilihat sebagai berikut:

Aspek	Sebelum CMS	Sesudah CMS
Waktu Transaksi	±1 hari kerja karena harus datang ke bank	±30 menit – 1 jam selesai secara daring
Biaya Operasional	Ada biaya transportasi dan cetak dokumen	Hampir nol biaya tambahan
Keamanan dan Akurasi	Rawan kesalahan manual dan keterlambatan	Sistem otomatis dengan histori digital
Aksesibilitas	Hanya dapat dilakukan di jam operasional bank	Dapat dilakukan kapan saja selama jaringan aktif

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Keunggulan penerapan CMS Bank Nagari di Dinas Pariwisata Kota Padang antara lain:

- Meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya transportasi pegawai.
- Mengurangi risiko kesalahan pengiriman dana karena sistem menyimpan histori transaksi secara otomatis.
- Menjamin keamanan transaksi karena hanya pejabat berwenang yang memiliki akses login.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena semua data transaksi dapat dilihat oleh auditor atau pimpinan dinas.

Penerapan CMS Bank Nagari ini sejalan dengan teori **Laudon dan Laudon (2018)** yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi organisasi melalui otomatisasi

proses dan integrasi data keuangan. Selain itu, hasil ini juga memperkuat penelitian **Haris (2023)** yang menemukan bahwa CMS Bank Nagari berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kecepatan transaksi keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan CMS Bank Nagari memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang, terutama dalam aspek kecepatan, keamanan, dan kemudahan transaksi keuangan non-tunai.

3. SIPKD (Manajemen Informasi Keuangan Daerah)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu inovasi utama yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengelola keuangan daerah secara digital. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui SIPKD, seluruh tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sebelum penerapan SIPKD, proses penganggaran dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja Excel dan dokumen fisik. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan pada pengisian kode rekening belanja, keterlambatan validasi, dan kesulitan dalam melakukan rekapitulasi anggaran. Validasi data juga harus dilakukan

dengan membawa dokumen ke BPKAD, yang memakan waktu dan menimbulkan risiko duplikasi atau kesalahan input.

Sejak penerapan SIPKD, seluruh proses tersebut menjadi lebih cepat dan akurat. Selama magang, penulis mengamati bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran menggunakan SIPKD untuk:

- a) Menginput kode rekening belanja sesuai kegiatan,
- b) Menyusun dokumen SPD (Surat Penyediaan Dana), dan
- c) Memantau realisasi anggaran setiap kegiatan secara real time.

Selain itu, sistem SIPKD otomatis menolak atau memberikan peringatan apabila terjadi kelebihan anggaran atau kesalahan pengisian kode rekening. Fitur ini sangat membantu dalam mencegah kesalahan administratif yang sebelumnya sering terjadi pada sistem manual.

Manfaat langsung penerapan SIPKD di Dinas Pariwisata Kota Padang antara lain:

- a. Meminimalisir kesalahan dalam pengisian kode belanja karena sistem memiliki validasi otomatis.
- b. Mempermudah pelaporan dan rekapitulasi anggaran melalui tampilan data real time.
- c. Memberikan peringatan otomatis jika terjadi kelebihan anggaran atau ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi.
- d. Meningkatkan kecepatan proses penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan.

Tabel 4. 2. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Sebelum SIPKD	Sesudah SIPKD
Proses Input Anggaran	Manual menggunakan Excel	Digital dan otomatis dalam sistem
Validasi Data	Dilakukan langsung di kantor BPKAD	Otomatis dan terintegrasi
Kesalahan Kode Rekening	Sering terjadi karena human error	Minim karena sistem memberi notifikasi
Pelaporan dan Rekapitulasi	Memakan waktu 2–3 hari	Dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja
Akses Data	Terbatas dan tidak real time	Real time dan terhubung antarinstansi

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Berdasarkan pengamatan penulis, penerapan SIPKD membuat proses pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata menjadi lebih tertib dan efisien. Data anggaran dan realisasi kini dapat dilihat kapan saja tanpa menunggu laporan manual dari tiap bidang. Selain itu, koordinasi antara dinas dan BPKAD menjadi lebih lancar karena sistem secara otomatis menyesuaikan setiap perubahan data.

Temuan ini sesuai dengan teori **Siregar dan Nurhayati (2021)** yang menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan daerah berbasis teknologi seperti SIPKD mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempercepat proses administrasi keuangan. Hal ini juga mendukung pendapat **Jogiyanto (2017)** bahwa sistem informasi keuangan yang terintegrasi berperan penting dalam mempercepat aliran data dan mengurangi redundansi informasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPKD berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional Dinas Pariwisata Kota Padang, terutama dalam hal kecepatan pelaporan, ketepatan penganggaran, dan pengawasan penggunaan dana kegiatan.

4. e-Katalog LKPP (Pengadaan Barang/Jasa Tanpa Tender)

Penerapan e-Katalog LKPP (Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) Untuk keperluan pengadaan barang dan jasa, **Dinas Pariwisata Kota Padang** telah menerapkan sistem **e-Katalog LKPP**, yaitu platform pengadaan digital yang dikelola oleh **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**. Sistem ini memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memilih dan membeli barang atau jasa yang tersedia secara nasional dari penyedia resmi tanpa harus melalui proses lelang atau tender terbuka.

Sebelum penerapan e-Katalog, proses pengadaan dilakukan secara manual melalui prosedur lelang konvensional. Dokumen pengadaan disiapkan oleh panitia, diserahkan ke bagian pengadaan, dan memerlukan waktu validasi dari beberapa pihak. Proses tersebut rata-rata memakan waktu **10–14 hari kerja** tergantung nilai dan jenis barang yang dibutuhkan. Selain lama, sistem manual juga membuka peluang terjadinya keterlambatan administrasi atau perbedaan harga karena kurangnya standar harga barang antar penyedia.

Sejak penggunaan **e-Katalog LKPP**, proses pengadaan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien. Staf cukup memilih barang atau jasa yang dibutuhkan melalui katalog daring, mencetak dokumen pemesanan, dan menyerahkannya ke bagian keuangan untuk proses pencairan. Sebagai contoh, saat pengadaan *alat tulis kantor*, staf hanya membutuhkan waktu

2–3 hari kerja untuk menyelesaikan seluruh proses, dari pemilihan barang hingga dokumen siap dibayarkan.

Tabel 4. 3. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Katalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) di Dinas Pariwisata Kota Padang

Aspek	Sebelum e-Katalog	Sesudah e-Katalog
Proses Pengadaan	Manual, melalui panitia lelang	Digital melalui portal LKPP
Waktu Penyelesaian	±10–14 hari kerja	±2–3 hari kerja
Transparansi Harga	Bervariasi antarpenyedia	Harga standar nasional LKPP
Risiko Kesalahan Dokumen	Cukup tinggi karena manual	Minim, karena sistem otomatis
Efisiensi Biaya	Ada biaya administrasi cetak dan perjalanan	Nyaris tanpa biaya tambahan

Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Temuan ini sejalan dengan teori **Laudon & Laudon (2018)** bahwa penerapan sistem digital dalam proses administrasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan kerja organisasi. Selain itu, penerapan e-Katalog LKPP mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

4.3 Kendala dan Solusi

Meskipun penggunaan teknologi keuangan telah membawa banyak kemudahan dan efisiensi, dalam pelaksanaannya di Dinas Pariwisata Kota

Padang tetap ditemukan sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Penulis mengelompokkan kendala ini menjadi tiga kategori utama: kendala teknis, kendala sumber daya manusia, dan kendala integrasi antar sistem.

1. Kendala Teknis

Kendala teknis merupakan hambatan yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, maupun perangkat keras yang digunakan dalam operasional keuangan berbasis teknologi.

Beberapa contoh kendala teknis yang ditemui di lapangan:

- a) **Koneksi internet tidak stabil:** Proses input data ke sistem seperti SIPKD atau pengajuan SP2D Online kadang terhambat karena gangguan koneksi, terutama pada jam sibuk atau ketika server pusat mengalami overload.
- b) **Sistem mengalami downtime:** Beberapa kali aplikasi CMS Bank Nagari tidak dapat diakses dalam waktu tertentu karena adanya maintenance dari pihak bank, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran kepada pihak ketiga.
- c) **Perangkat komputer tidak merata:** Tidak semua pegawai memiliki akses ke komputer atau laptop yang memadai, sehingga pekerjaan kadang harus antri atau dipusatkan pada satu unit perangkat.

Solusi:

- a) Mengusulkan peningkatan kapasitas bandwidth kantor dan backup jaringan dengan modem seluler.

- b) Menyusun jadwal transaksi dan penginputan agar tidak terjadi beban bersamaan pada sistem.
- c) Melakukan pengadaan perangkat komputer tambahan dan peremajaan perangkat lama.

2. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun sistem telah disediakan dan diterapkan, tantangan terbesar justru berasal dari **tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai** dalam mengoperasikan sistem teknologi keuangan.

Beberapa kasus nyata yang diamati:

- a) Pegawai yang sudah lama bekerja merasa kurang nyaman menggunakan sistem baru dan lebih memilih cara manual.
- b) Terjadi kesalahan input data karena kurangnya pelatihan teknis.
- c) Beberapa pegawai belum familiar dengan proses revisi anggaran atau penginputan SPD melalui SIPKD.

Solusi:

- a) Dinas secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi keuangan.
- b) Menyediakan SOP tertulis atau video tutorial internal sebagai panduan penggunaan sistem.
- c) Menugaskan pegawai muda yang lebih fasih teknologi untuk mendampingi staf senior dalam proses input data.

3. Kendala Integrasi Sistem

Terkadang, antar aplikasi belum terintegrasi secara otomatis, sehingga data harus diinput ulang atau dipindahkan manual dari satu sistem ke sistem lain.

Contoh:

- a) Data dari SIPKD tidak langsung masuk ke SIMDA, sehingga terjadi duplikasi input.
- b) Pengadaan melalui e-Katalog tidak selalu sinkron dengan kode akun belanja yang tersedia di SIPKD.

Solusi:

- a) Koordinasi antar OPD (terutama dengan BPKAD) untuk menyelaraskan format dan kode rekening.
- b) Mendorong pemerintah daerah untuk memperbarui sistem agar terintegrasi secara horizontal antar aplikasi keuangan.

Tabel 4. 4. Ringkasan Kendala dan Solusi Penggunaan Teknologi Keuangan

No	Jenis Kendala	Contoh Kasus di Lapangan	Solusi yang Diterapkan
1	Teknis	Aplikasi CMS tidak bisa diakses saat pembayaran vendor	Penjadwalan ulang transaksi, komunikasi dengan bank
2	Jaringan	SIPKD gagal input karena koneksi lambat	Gunakan jaringan cadangan (modem)
3	SDM	Pegawai salah input kode rekening di SIPKD	Pelatihan rutin, pendampingan staf TI

No	Jenis Kendala	Contoh Kasus di Lapangan	Solusi yang Diterapkan
4	Integrasi Sistem	Data dari e-Katalog tidak langsung terbaca di SIPKD	Sinkronisasi manual dan revisi kode belanja
5	Perangkat Keras	Beberapa staf berbagi 1 komputer untuk input CMS dan SIPKD	Usulan pengadaan komputer tambahan

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara, 2024

Kendala-kendala tersebut tidak menjadi penghalang utama karena pihak Dinas Pariwisata menunjukkan upaya aktif untuk mencari solusi dan beradaptasi. Justru, proses adaptasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan bukan hanya soal alat, tetapi juga kesiapan organisasi dan budaya kerja

4.4 Dampak Penerapan Teknologi Keuangan terhadap Efisiensi Operasional

Penerapan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mendukung pelaksanaan **transaksi non-tunai (cashless)** dan **digitalisasi pengelolaan keuangan daerah**.

Berdasarkan hasil observasi, sistem keuangan digital yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang meliputi:

1. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Sistem ini digunakan untuk mengelola perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Melalui SIPKD, setiap kegiatan dan anggaran dapat

dipantau secara terpusat oleh bagian keuangan dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). SIPKD memudahkan proses pembuatan dokumen seperti DPA, RKA, dan laporan realisasi anggaran, sehingga mengurangi potensi kesalahan manual dan mempercepat pelaporan.

2. SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah)

Aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu pengelolaan keuangan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dinas Pariwisata menggunakan SIMDA untuk pencatatan transaksi harian dan penyusunan laporan bulanan keuangan dinas.

3. SP2D Online (Surat Perintah Pencairan Dana Online)

Sistem ini digunakan untuk mempercepat proses pencairan dana kegiatan. Sebelum adanya sistem online, pengajuan SP2D dilakukan secara manual yang memakan waktu beberapa hari. Dengan sistem digital, proses pencairan dapat dilakukan dalam hitungan jam.

4. CMS Bank Nagari (Cash Management System)

CMS digunakan untuk transaksi keuangan digital antara Dinas Pariwisata dan Bank Nagari. Melalui CMS, bagian keuangan dapat melakukan pengecekan saldo, transfer, dan monitoring transaksi secara real time tanpa perlu datang ke bank.

Penerapan sistem-sistem di atas menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang telah mengintegrasikan teknologi keuangan untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi keuangan.

4.5 Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Penerapan teknologi keuangan dalam lingkungan pemerintahan daerah, termasuk pada Dinas Pariwisata Kota Padang, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi birokrasi keuangan. Namun demikian, sebagaimana halnya dengan inovasi teknologi lainnya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan dan dievaluasi secara berkala.

Berikut adalah uraian kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman langsung selama kegiatan magang:

1. Kelebihan Penggunaan Teknologi Keuangan

a) Efisiensi Proses Administratif

Penggunaan sistem seperti **SP2D Online**, **SIPKD**, dan **CMS Bank Nagari** memangkas prosedur manual yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga. Proses pencairan, input anggaran, dan pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam waktu singkat dan tanpa perpindahan lokasi.

b) Peningkatan Akurasi Data

Dengan sistem digital, peluang terjadinya kesalahan input data atau penghitungan menjadi lebih kecil. Misalnya, aplikasi **SIMDA Keuangan** akan langsung menampilkan total pengeluaran dan saldo secara otomatis setelah input data transaksi harian dilakukan.

c) Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap transaksi tercatat dalam sistem dan dapat dilacak kembali oleh pejabat berwenang maupun auditor. Ini memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta meminimalisir potensi kecurangan atau manipulasi.

d) Mendukung Reformasi Birokrasi dan SPBE

Penerapan sistem digital mendukung visi reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan modern.

e) Kemudahan Akses dan Fleksibilitas

Sebagian besar sistem (misalnya CMS dan e-Katalog LKPP) dapat diakses secara daring melalui komputer/laptop tanpa harus datang ke lokasi fisik, sehingga memberi fleksibilitas kerja bagi pegawai.

2. Kekurangan atau Kendala yang Dihadapi

a) Ketergantungan pada Jaringan Internet

Karena hampir semua aplikasi berbasis online, maka koneksi internet menjadi kebutuhan utama. Ketika jaringan lambat atau terputus, seluruh proses pekerjaan akan terhambat.

b) Kemampuan SDM yang Belum Merata

Tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem teknologi keuangan. Pegawai senior sering kali kesulitan dalam menggunakan fitur-fitur baru tanpa pelatihan yang memadai.

c) Belum Terintegrasinya Seluruh Sistem

Beberapa sistem masih berjalan secara terpisah (misalnya antara SIPKD dan SIMDA), sehingga data harus dimasukkan lebih dari sekali. Ini menimbulkan beban kerja tambahan dan risiko duplikasi input.

d) Keterbatasan Infrastruktur Perangkat Keras

Di beberapa ruangan kerja, fasilitas komputer dan printer masih terbatas, menyebabkan antrian dalam proses input data dan cetak dokumen.

Tabel 4. 5. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Teknologi Keuangan

No	Aspek	Kelebihan	Kekurangan
1	Waktu	Proses pencairan dan pelaporan lebih cepat	Terhambat saat jaringan internet tidak stabil
2	Tenaga Kerja	Beban administrasi berkurang karena otomatisasi	Pegawai yang belum familiar membutuhkan pendampingan
3	Akurasi dan Data	Kesalahan input berkurang, validasi otomatis	Harus input ganda jika sistem belum terintegrasi
4	Biaya Operasional	Mengurangi biaya ATK dan transportasi	Keterbatasan perangkat keras di beberapa bagian
5	Akses dan Mobilitas	Dapat diakses dari kantor tanpa perlu datang ke bank atau BPKAD	Ketergantungan pada aplikasi luar (CMS, e-Katalog)

Sumber: Hasil Observasi dan Dokumentasi, 2024

Beberapa sistem, seperti CMS Bank Nagari atau e-Katalog, dikelola oleh pihak eksternal. Saat terjadi kendala teknis atau pemeliharaan sistem, pihak OPD tidak bisa melakukan intervensi langsung.

4.6 Keterkaitan dengan Teori

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, penerapan berbagai sistem teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang terbukti berhubungan erat dengan teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab II.

a) **Keterkaitan dengan Teori Teknologi Keuangan (*Financial Technology*)**

Seperti dijelaskan oleh Schueffel (2016) dan Otoritas Jasa Keuangan (2022), *financial technology* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses layanan. Penerapan SP2D Online, CMS Bank Nagari, SIPKD, dan e-Katalog LKPP merupakan bentuk nyata implementasi fintech dalam sektor publik seluruh sistem ini terbukti mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, serta mengurangi biaya operasional, sesuai dengan prinsip utama teknologi keuangan yang menekankan efisiensi dan efektivitas proses.

b) **Keterkaitan dengan Teori Efisiensi Operasional.**

Menurut Siagian (2018) dan Mulyadi (2020), efisiensi operasional diukur dari kemampuan organisasi untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Berdasarkan hasil observasi, penerapan sistem digital seperti SP2D Online dan CMS Bank Nagari mampu memangkas waktu kerja dari beberapa hari menjadi hanya beberapa jam. Selain itu, SIPKD dan SIMDA meminimalkan kesalahan penginputan data, sedangkan e-Katalog LKPP mempercepat pengadaan barang/jasa hingga 70%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fintech di Dinas Pariwisata Kota Padang telah berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya waktu, tenaga, dan biaya, sejalan dengan teori efisiensi operasional.

c) **Keterkaitan dengan Teori Sistem Informasi Manajemen Keuangan**

Jogiyanto (2017)

menyatakan bahwa sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan organisasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa SIPKD dan SIMDA membantu bagian keuangan Dinas Pariwisata mengakses data real time terkait anggaran, realisasi, dan saldo kas. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat karena data tersedia setiap saat. Hal ini mendukung teori bahwa sistem informasi yang baik meningkatkan efisiensi serta kualitas keputusan keuangan.

d) **Keterkaitan dengan Teori Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik**

Menurut **Laudon & Laudon (2018)**, transparansi keuangan dapat tercapai apabila sistem informasi dapat mencatat dan menelusuri setiap transaksi secara otomatis. Penerapan SP2D Online, CMS, dan e-Katalog LKPP di Dinas Pariwisata Kota Padang menciptakan jejak digital yang lengkap sehingga memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban keuangan.

Seluruh transaksi kini dapat dilacak secara daring, mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah.

e) **Keterkaitan dengan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah.**

Penerapan seluruh sistem tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem keuangan digital seperti SIPKD dan SP2D *Online* dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dinas Pariwisata Kota Padang merupakan salah satu instansi yang telah berhasil menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten.

Keterkaitan teori di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi keuangan di Dinas Pariwisata Kota Padang tidak hanya sejalan dengan teori akademik, tetapi juga dengan kebijakan nasional mengenai digitalisasi pemerintahan. Setiap sistem yang diterapkan baik SP2D *Online*, CMS Bank Nagari, SIPKD, SIMDA Keuangan, maupun e-Katalog LKPP telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah

